

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hukum Administrasi Negara Sadi Is, Muhamad & Kun Budianto. 2021. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Kencana.

Membahas konsep dasar hukum administrasi, termasuk sanksi administratif dan penegakannya oleh pemerintah daerah.

Hukum Administrasi Negara: Teori, Prinsip, dan Praktik Tata Kelola Pemerintahan Damanik, Pandapotan, dkk. *Hukum Administrasi Negara: Teori, Prinsip, dan Praktik Tata Kelola Pemerintahan*. Jakarta: Media Penerbit Indonesia. Menjelaskan prinsip-prinsip pemerintahan dan penerapan sanksi administratif dalam praktik pemerintahan.

Hukum Administrasi Negara Paramitha, Amelia Ayu, dkk. 2023. *Hukum Administrasi Negara*. Sada Kurnia Pustaka. Memuat bab khusus tentang sanksi administrasi negara dan mekanisme penegakannya.

Sanksi Administratif dalam Perspektif Hukum Pidana Naibaho, Nathalina. 2025. *Sanksi Administratif dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. Mengkaji jenis-jenis sanksi administratif (teguran, denda, pencabutan izin) serta perbandingannya dengan sanksi pidana.

Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi Hadjon, Philipus M., dkk. 2012. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UGM Press. Membahas wewenang pemerintah, penyalahgunaan wewenang, dan penegakan hukum administratif.

Hukum Pidana Kejahatan dan Pelanggaran Farhana. 2025. *Hukum Pidana Kejahatan dan Pelanggaran*. Medan: Media Penerbit Indonesia.

Memberikan dasar teori tentang pelanggaran hukum (termasuk petasan sebagai pelanggaran ketertiban umum).

Pidana Pajak: Sanksi Pidana dan Administrasi di Indonesia Hakim, Nur. 2024. *Pidana Pajak: Sanksi Pidana dan Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. Menjelaskan hubungan antara sanksi administratif dan pidana dalam penegakan hukum.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Mengatur larangan kepemilikan, penyimpanan, dan penggunaan bahan peledak termasuk petasan tanpa izin.

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Menjadi dasar utama dalam penelitian karena mengatur larangan, pengawasan, dan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketertiban umum (termasuk petasan).

C. Jurnal/Artikel

Wahyudi, Tri. 2019. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang Berkaitan dengan Menjual Belikan Petasan di Kota Balikpapan.

Kusuma, Ignatius Enggarjati & Masnun, Muh. Ali. 2025. "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Madiun." *Indonesian Journal of Contemporary Law*.

Tisna, I Gede Oka & Lestari, Anak Agung Adi. "Efektivitas Penegakan Hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait Pelanggaran Ketertiban Umum di Kota Denpasar." *Jurnal Hukum Mahasiswa*.

Jumadil, Ahmad; Jaya, Alwi; Hartawati, Andi. "Upaya Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone." *Jurnal Reformasi Hukum*.

Setyawan, Faisal Yogi; Peter, Daniel Lodewijk; Wahyudi, Slamet Tri. 2026. "Penegakan Hukum terhadap Penggunaan Knalpot Brong sebagai Upaya Menjaga Ketertiban Umum." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*.

Ismi, Aghna Laili, Ranga Jayanuarto, Hendi Sastra Putra, dan Mikho Ardinata. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tantangan Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022." *Progresif: Jurnal Hukum* 19, no. 1 (2025).

Susiyanto, Mikho Ardinata, Sinung Mufti Hangabei, dan Hendi Sastra Putra. "Hak Asasi Manusia dan Pemenuhan Pendampingan Hukum." *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 7, no. 1 (2025).

Wibawa, Jovansyah Mulya Cipta, Rangga Jayanuarto, Sinung Mufti Hangabei, dan Hendi Sastra Putra. "Restorative Justice in the KUHP and Protection of Sexual Violence Victims." *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 7, no. 1 (2025).

